

**Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Pedesaan
Tri Manunggal Jaya Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang;
Perspektif Islam**

**Latifatu Rohmah
Dhea Yustiana Safitri
Erin Wulansari
Muhammad Mumakin
Achmad Nur Alfianto**

STAI Al Husain Magelang
E-mail: latifatu.rohmah19@gmail.com
E-mail: achmadnuralfianto@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the factors that determine the policy implementation in the development of rural areas with a top-down approach in the rural area of Tri Manunggal Jaya. Factors that determine Policy Implementation include Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This study used qualitative research methods by conducting literature reviews, document verification, interviews, and observations. This research produces a theoretical and empirical view of the factors that determine policy implementation in the development of rural areas in Tri Manunggal Jaya. The results of this study also can be used to determine strategies to increase the effectiveness of the implementation of rural area development policies with a top-down approach in the Magelang Regency.

Keywords : Policy Implementation, Top-Down Approach, Rural Area Development, Tri Manunggal Jaya

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan pengembangan kawasan pedesaan dengan pendekatan top-down di Desa Tri Manunggal Jaya. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi pustaka, verifikasi dokumen, wawancara, dan observasi. Penelitian ini menghasilkan pandangan teoritis dan empiris tentang faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan dalam pembangunan pedesaan di Tri Manunggal Jaya. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menentukan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan pedesaan dengan pendekatan top-down di Kabupaten Magelang.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pendekatan Top-Down, Pengembangan Pedesaan, Tri Manunggal Jaya

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu industri yang berkontribusi bagi pendapatan negara. Walaupun sebagian besar sektor pariwisata menurun akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020, akan tetapi selama tahun 2020 sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 4% (Kemenparenkraf, 2020).

Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2020 mencapai 4.042.923 kunjungan, sedangkan jumlah wisatawan domestik pada tahun 2020 sebanyak 140 juta pengunjung (Mustika, 2020). Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf

menyampaikan bahwa di tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik dapat bertambah seiring kebijakan penanganan pandemi dan *new normal* (Kemenparenkraf, 2021).

Salah satu objek wisata yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara maupun domestik adalah Candi Borobudur. Pada tahun 2019 jumlah pengunjung Candi Borobudur mencapai 4,39 juta orang (Antara, 2021). Selain Candi Borobudur setidaknya ada beberapa tempat wisata lain di Kabupaten Magelang yang juga menjadi tujuan wisatawan mancanegara maupun domestik diantaranya Candi Mendut, Candi Pawon, Ketep Pas, Candi Selogriyo, Punthuk Setumbu, Candi Ngawen, Bukit Rhema, Candi Umbul, Taman Rekreasi Mendut, Air Terjun Sekar Langit, Telaga Bleder, Seloprojo, Air Terjun Kedung Kayang, dan Curug Silawe (Badan Pusat Statistik, 2018).

Dari beberapa tempat yang menjadi objek wisata tersebut Candi Borobudur masih menjadi tempat wisata pilihan utama wisatawan jika berkunjung ke Kabupaten Magelang. Akan tetapi, dengan semakin beragamnya objek wisata di Kabupaten Magelang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang dari tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan. Adapun data kunjungan wisatawan di magelang baik dari mancanegara maupun domestic disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Wisatawan di Kabupaten Magelang tahun 2017-2020

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	Mancanegara	Domestik	
2017	246.665	4.265.252	4.511.917
2018	325.035	4.423.955	4.748.990
2019	350.335	4 440 173	5 063 027
2020	34.837	1.120.837	1.155.674

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021, 2019, 2018)

Dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2017-2019, sektor pariwisata menjadi salah satu dari sepuluh sektor unggulan Kabupaten Magelang. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Magelang tahun 2019-2024 sektor pariwisata menjadi prioritas keempat. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di sektor wisata Kabupaten Magelang pada tahun 2018 mencapai Rp. 1,26 triliun, dan pada tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp. 1,42 triliun, dan pada tahun 2020 nilai PDRB ditargetkan Rp. 1,52 triliun (Budiono, 2019).

Semakin besar nilai PDRB yang ditargetkan menjadikan pemerintah Kabupaten Magelang lebih kreatif dalam mengembangkan destinasi-destinasi wisata yang lebih beragam. Selain mengembangkan infrastruktur dan fasilitas dari wisata yang sudah ada, pemerintah Kabupaten Magelang pun turut mengembangkan potensi wisata berbasis pedesaan. Salah satu bentuk destinasi wisatanya adalah pengembangan Kawasan Pedesaan di Kabupaten Magelang.

Terdapat dua pendekatan dalam merencanakan pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Magelang yaitu perencanaan kawasan dengan menggunakan pendekatan *top down planning* dan *bottom up planning* (Bappenas, 2005). Perencanaan pengembangan kawasan dengan menggunakan pendekatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat dikenal dengan istilah *bottom up planning*. Konsep

tersebut merupakan konsep perencanaan pengembangan kawasan dengan mengedepankan potensi sumber daya lokal (Suriadikusumah, Talkuputra, & Alemina, 2011).

Pendekatan *bottom up planning* didasarkan pada partisipasi masyarakat untuk dapat menerapkan kebijakannya sendiri. Selain itu, pendekatan tersebut juga dalam pelaksanaannya dinilai lebih sesuai karena dapat merencanakan strategi dengan menyesuaikan kondisi riil yang ada di masyarakat (Ekowati, 2009).

Perencanaan kawasan dengan menggunakan pendekatan *top down planning* merupakan perencanaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. pemerintah dalam hal ini berperan sebagai pemberi arahan. seluruh kegiatan perencanaan dibuat oleh pemerintah tanpa harus mendapatkan aspirasi dari masyarakat, sehingga peran dan keterlibatan masyarakat dalam pendekatan *top down planning* tersebut relatif sedikit (Sururi, 2016).

Kawasan pedesaan di Kabupaten Magelang yang dikembangkan dengan pendekatan *top down planning* antara lain Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya di Kec. Borobudur, Kawasan Pedesaan Eduwisata Ngablak Kec. Ngablak, dan Kawasan Pedesaan Agrowisata Ngluwar Kec. Ngluwar. Sedangkan kawasan pedesaan yang menggunakan pendekatan *bottom up* adalah Kawasan Pedesaan di Kec. Dukun. Dari empat kawasan pedesaan tersebut kawasan pedesaan di Kec. Dukun dengan pendekatan *bottom up planning* yang dinilai berhasil, sedangkan tiga kawasan pedesaan dengan pendekatan *top down planning* dianggap kurang berhasil.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kholil, 2015) juga berpendapat bahwa perencanaan kawasan dengan menggunakan pendekatan *top down planning* pada umumnya dalam pelaksanaannya dianggap kurang berhasil. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan karena partisipasi dari masyarakat pada pendekatan *top down planning* yang relatif minim, sehingga implementasi kebijakan pengembangan kawasan pedesaan yang dilakukan pemerintah hasilnya belum maksimal. Atas dasar hal tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang menentukan pelaksanaan implementasi kebijakan dengan pendekatan *top down* dalam pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Magelang.

Penelitian ini menganalisis faktor yang menentukan implementasi perencanaan kawasan pedesaan dengan pendekatan *top-down planning*, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan hasil yang maksimal pada kinerja kawasan pedesaan khususnya yang dikembangkan dengan pendekatan *top-down planning*.

TINJAUAN PUSTAKA

Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam pengembangan kawasan wisata pedesaan. Dalam penelitian yang dilakukan Kholil (2015) berpendapat bahwa perencanaan kebijakan dengan menggunakan pendekatan *top down planning* pada umumnya

dalam pelaksanaannya dianggap kurang berhasil. Selaras dengan hal tersebut López-Guzmán et al., (2011), Chaudhary et al., (2014), Legi et al., (2015), dan Kawer et al., (2018) dalam penelitiannya juga mengemukakan bahwa pendekatan pengembangan kawasan pedesaan yang ideal adalah pendekatan yang berbasis pada masyarakat.

Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irawan (2015), Mondal (2017), dan Tampah et al., (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak karena disebabkan oleh faktor-faktor seperti sumber daya manusia, ketersediaan anggaran dan besarnya investasi, komunikasi antar *stakeholder*, disposisi serta struktur organisasi.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses maupun tindakan yang bersifat administratif dan dapat dilakukan oleh organisasi baik pemerintah maupun swasta serta dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi suatu kebijakan dilakukan pada saat tujuan dan sasaran kebijakan telah ditetapkan. Selain itu bentuk program kegiatan telah disusun, dana kegiatan juga telah disediakan dan siap untuk disalurkan pada sasaran kebijakan tersebut (Grindle, 1980) dalam (Akib, 2010).

Menurut (Sabatier, 1986) implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan merupakan persamaan fungsi dari maksud dan tujuan, *output* dan *outcome*. Konsep tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan formula yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil produk dan hasil dari akibat.
2. Implementasi kebijakan merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, inisiator dan waktu.
3. Konsep tersebut menekankan bahwa implementasi kebijakan berfokus pada kebijakan itu sendiri, pihak yang merancang dan menginisiasi kebijakan, dan pelaksana kebijakan dalam waktu tertentu.

Implementasi kebijakan memiliki tugas untuk membangun jaringan yang bertujuan agar sebuah kebijakan dapat direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah dengan melibatkan para pihak pemangku kepentingan (Grindle, 1980).

Bentuk implementasi kebijakan dikembangkan menjadi dua model yaitu:

1. *Top Down Approach*

Pendekatan top down merupakan sebuah pendekatan dalam implementasi kebijakan yang berasal dari pemerintah. Seluruh kegiatan dari perencanaan dan pelaksanaannya didominasi oleh pusat atau pemerintah, sehingga peran dan keterlibatan masyarakat dalam pendekatan ini relatif sedikit. Bentuk implementasi top down bersifat sentralistik

2. *Bottom Up Approach*

Implementasi kebijakan menggunakan pendekatan bottom up lebih banyak melibatkan peran masyarakat. pendekatan ini didasarkan pada inisiasi, kreasi masyarakat, sehingga praktik implementasi suatu kebijakan disesuaikan dengan kondisi di tingkat bawah atau masyarakat (Sabatier, 1986).

Faktor-Faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor. (Edward III, 1984) menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi suatu kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Menurut (Edward III, 1984) terdapat tiga hal yang menentukan dalam proses penyampaian informasi kebijakan tersebut antara lain :

- a) Transmisi, proses penyampaian informasi kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan saja, akan tetapi juga disampaikan kepada sasaran kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan.
- b) Kejelasan, kebijakan yang telah disampaikan kepada berbagai pihak sebaiknya diterima dengan jelas, sehingga para pemangku kepentingan mengetahui maksud, tujuan, sasaran serta hasil yang akan dicapai dari kebijakan tersebut
- c) Konsistensi, konsistensi dalam hal komunikasi perlu dilakukan agar implementasi kebijakan sesuai target dan efektif. Komunikasi yang konsisten antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan para pemangku kepentingan akan mempermudah jalannya implementasi kebijakan

2. Sumber daya

Agar implementasi kebijakan sesuai dengan maksud dan tujuan serta tepat sasaran, maka diperlukan sumber daya sebagai daya dukung implementasi kebijakan. Sumber daya yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan antara lain:

- a) Sumber daya manusia
- b) Sumber daya anggaran
- c) Sumber daya fasilitas
- d) Sumber daya informasi dan kewenangan

3. Disposisi atau Sikap birokrasi

Sikap birokrasi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan pada pemangku kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara sungguh-sungguh agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Proses

disposisi memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap suatu kebijakan. Output dari proses disposisi berupa sikap menerima, acuh tak acuh maupun menolak suatu kebijakan (Winarno, 2002).

4. Struktur organisasi atau birokrasi

Organisasi atau birokrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan terlaksananya sebuah kebijakan. Struktur organisasi yang jelas akan meningkatkan kinerja dan komunikasi antar struktur. Selain itu struktur organisasi yang jelas juga harus didukung oleh SOP yang harus dipatuhi anggota organisasi ataupun birokrasi. Struktur birokrasi yang terpecah akan meningkatkan kemungkinan kegagalan komunikasi dalam implementasi kebijakan (Widodo, 2013).

Kawasan Pedesaan

Kawasan pedesaan merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi (Pemda Magelang, 2011). Dalam mengembangkan kawasan pedesaan pemerintah menyusun sebuah kebijakan sesuai potensi yang ada dengan tetap mempertahankan ciri khas pedesaan. Strategi pengembangan kawasan pedesaan meliputi:

1. Menumbuhkan keberadaan pusat pertumbuhan pedesaan yang berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kecil menengah
2. Mengembangkan kawasan agropolitan utama
3. Mengembangkan satu desa satu produk berbasis potensi dan daya dukung lokal
4. Mengembangkan model desa konservasi dan pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk desa-desa hulu mikro DAS/desa di tepi hutan lindung dan produksi
5. Memperkuat basis ekonomi pedesaan dengan pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan prasarana untuk mendukung akses layanan antarkawasan pedesaan antara kawasan pedesaan dengan perkotaan dan mengarahkan pengembangan wilayah di Kabupaten melalui pemantapan fungsi PPL dan desa pusat pertumbuhan.

Maqashid Syariah

Al-Fasi menjelaskan *maqasid syariah* dengan tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya (Sahroni & Karim, 2015). Sementara itu, (Zuhaili, 1986) menjelaskan *maqasid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syaria' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dalam setiap ketentuan hukum. Sehingga dapat disimpulkan *maqasid syariah* adalah merealisasikan maslahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadat dari mereka. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zainal, et.al, 2013). Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Masalahat *al-Dharuriyat*, adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.
2. Masalahat *Hajiyat*, adalah sesuatu yang sebaiknya ada pada kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Meskipun begitu, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.
3. Masalahat *Tahsiniyat*, adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan (Syarifuddin, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif peneliti membuat sebuah gambaran dari laporan maupun informasi dari informan. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dengan peneliti merupakan instrumen kunci.

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya, Borobudur Kabupaten Magelang. Data diperoleh melalui beberapa cara antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi. Data yang digunakan merupakan informasi yang diperoleh dari perangkat desa setempat, pengurus kawasan pedesaan TMJ, dan masyarakat sekitar desa. Data yang diperoleh merupakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari laporan-laporan maupun dokumen yang diperlukan.

Data yang diperoleh merupakan data yang bersifat deskriptif dan analisis data dilakukan dengan cara induktif. Teknik analisis yang dipakai dibagi menjadi beberapa langkah antara lain pengumpulan data lapangan, mereduksi data dengan memilih data dan dokumen yang relevan, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi terhadap data yang dianalisis (Miles & Huberman, 1992).

HASIL PENELITIAN

Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya (TMJ) merupakan kawasan pedesaan yang terbentuk secara *Top Down*. Kawasan pedesaan ini dibentuk berdasarkan program dari Kementerian Desa untuk penanganan Desa Tertinggal. Program tersebut merupakan salah satu strategi Kementerian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program pengembangan pariwisata nasional berbasis pedesaan.

Kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya ini berada di kawasan Borobudur Kabupaten Magelang. Nama Tri Manunggal Jaya memiliki arti bersatunya tiga desa. Sehingga kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya tersebut terdiri dari tiga desa wisata, yaitu desa Tanjungsari, Karangrejo dan Karanganyar.

Secara geografis, ketiga desa yang tergabung dalam TMJ tersebut memiliki lokasi yang berdekatan. Selain letak geografis, ketiga desa tersebut memiliki potensi wisata alam, wisata edukasi dan wisata budaya maupun kearifan lokal. Kawasan pedesaan TMJ diproyeksikan menjadi cikal bakal ekowisata di Borobudur (Wawancara dengan Pengelola TMJ, 2021).

Salah satu fasilitas wisata yang ditawarkan oleh kawasan pedesaan TMJ ini adalah tersedianya paket tur wisata yaitu wisata alam di Desa Karangrejo seperti Bukit Rhema, Bukit Barede, Punthuk Setumbu, dan Gereja Ayam. Setelah itu dilanjutkan wisata edukasi di desa Karanganyar untuk melihat produksi gerabah, dan selanjutnya melihat produksi tahu dan madu di desa Tanjungsari.

Secara administratif kawasan pedesaan ini dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa setempat dan merupakan salah satu badan usaha milik desa (BUMDes). Dalam mengembangkan kawasan pedesaan, TMJ memiliki visi yaitu memajukan tiga desa dalam satu kawasan Tri Manunggal Jaya. Visi tersebut diwujudkan dalam misi membangun BUMDes dan mengelola bersama.

Pusat kegiatan wisata dari TMJ ada di desa Karanganyar, akan tetapi saat ini dari ketiga desa tersebut Desa Karangrejo dianggap sebagai salah satu desa yang sudah maju. Oleh karena itu diharapkan dua desa yang lainnya juga memperoleh efek yang sama. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari pengembangan kawasan pedesaan TMJ ini tidak lain yaitu memajukan ketiga desa wisata tersebut (Wawancara dengan Pengelola TMJ, 2021).

PEMBAHASAN

Menurut (Edward III, 1984), faktor yang menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam pengembangan kawasan pedesaan termasuk dalam mensosialisasikan visi misi maupun strategi dari Kemendes, Dinas Pariwisata kepada Pemerintah Desa, maupun masyarakat. oleh karena itu komunikasi merupakan penghubung antara pelaksana kebijakan baik antar lembaga pemerintah, lembaga pariwisata maupun masyarakat itu sendiri.

Komunikasi dalam penelitian ini merupakan gambaran dari kebijakan Kemendes dan Dinas Pariwisata mensosialisasikan implementasi kebijakannya kepada Pemangku kepentingan termasuk pemerintah desa dan masyarakat dalam mengembangkan objek pariwisata khususnya kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya. Indikator komunikasi dalam penelitian ini antara lain diukur dari transmisi, kejelasan komunikasi dan konsistensi komunikasi.

Transmisi merupakan penyaluran segala bentuk informasi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan pedesaan TMJ dari Kemendes dan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa dan masyarakat. Transmisi komunikasi disalurkan melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang kepada Pemerintah Desa setempat. Selain itu, sosialisasi pengembangan kawasan pedesaan kepada masyarakat juga dilakukan di setiap desa wisata.

Kejelasan informasi berperan penting dalam menunjang terlaksananya program pengembangan kawasan pedesaan TMJ. Selaku pembuat kebijakan, Kemendes dan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang perlu menyampaikan informasi secara jelas kepada pemerintah desa dan masyarakat. Informasi yang diberikan sudah disampaikan secara jelas kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui komunikasi langsung salah satunya melalui sosialisasi.

Akan tetapi kegiatan sosialisasi dinilai belum konsisten dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membatasi komunikasi langsung. Pelatihan dan sosialisasi sudah direncanakan sejak awal Juni 2021 oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, akan tetapi belum sempat terlaksana karena adanya pandemi.

Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan organisasi dalam kegiatan pengembangan pariwisata kawasan pedesaan antara lain sumber daya tenaga kerja, sumber daya fisik seperti fasilitas, sumber daya informasi dan sumber daya anggaran. Pengembangan kawasan pedesaan TMJ dikelola oleh staf maupun tenaga kerja profesional yang terdiri staff dari Dinas Pariwisata dan masyarakat.

Pengelola kawasan pedesaan secara administrasi dibentuk sebagai BUMDes dan diawasi oleh pemerintah desa. Selain dikelola oleh professional dan masyarakat sekitar, kawasan pedesaan TMJ juga menyediakan fasilitas paket tur wisata. Dalam tur wisata tersebut pihak pengelola menyediakan penginapan dalam bentuk *homestay* seperti Balkondes, maupun tempat peristirahatan yang disediakan di rumah-rumah masyarakat di sekitar kawasan pedesaan. Dari segi sumber daya informasi, kawasan pedesaan TMJ tersedia fasilitas yang mempermudah informasi seperti koneksi internet yang baik. Selain itu, TMJ juga sudah memanfaatkan media sosial sebagai media promosi, hanya saja belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan rencana administrasi keuangan, kawasan pedesaan TMJ memiliki sumber daya anggaran yang cukup besar senilai Rp. 3 Miliar. Akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19 anggaran turun menjadi Rp. 150 juta. Anggaran sebesar Rp. 150 juta pun sampai saat ini belum terealisasi karena dana sebagian besar dialokasikan untuk penanganan pandemi.

Disposisi / Kecenderungan Sikap Pelaksana Kebijakan

Kecenderungan sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pariwisata berperan penting dalam menentukan jalannya suatu kebijakan. Disposisi implementasi kebijakan diukur melalui tiga macam respon dari pelaksana kebijakan. Ketiga respon tersebut antara lain pengetahuan, pemahaman dan pendalaman kebijakan, respon menerima, menolak atau netral terhadap kebijakan, yang terakhir adalah intensitas terhadap kebijakan (Pallewa, 2016).

Sikap positif ditunjukkan berdasarkan kesungguhan dan antusias masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan yang diberikan. Selain itu kebijakan pengembangan kawasan pedesaan juga didukung oleh pemerintah desa. Harapannya program maupun kebijakan ini dapat membantu memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat desa. Akan tetapi, beberapa hal juga

menjadi hambatan dari pelaksanaan kebijakan tersebut seperti anggaran dana yang dipangkas, kualitas SDM yang masih rendah di bidang pariwisata, sarana dan prasarana yang relatif kurang, serta pengelolaan yang belum optimal karena pandemi.

Struktur Birokrasi/Organisasi

Agar proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan struktur birokrasi. Struktur birokrasi memuat beberapa hal antara lain SOP dan penyebaran tanggung jawab (Lahamadi, et. al, 2016). Pengelola Kawasan pedesaan TMJ ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Divisi. Dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan pedesaan TMJ tersebut belum terdapat SOP yang secara khusus mengatur kawasan pedesaan TMJ yang didasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi.

Hal tersebut dapat disebabkan karena terhambatnya arahan dari pemangku kepentingan dan lesunya sektor pariwisata akibat pandemi. Hal tersebut dikarenakan pada saat pengembangan kawasan pedesaan TMJ mulai ramai, sektor pariwisata dihadapkan dengan pandemi Covid-19 sehingga pengembangan terkait SOP dari TMJ ini belum dilanjutkan.

Perspektif Islam

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini ditunjukkan oleh lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zainal, et.al, 2013).

1. Terjaganya Agama

Program pengembangan kawasan pedesaan TMJ ini tidak hanya berfokus pada program wisata saja. Dengan adanya pengembangan kawasan wisata memungkinkan untuk pemenuhan fasilitas pendukung seperti fasilitas ibadah.

2. Terjaganya jiwa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya program pengembangan kawasan pedesaan TMJ turut berperan dalam terjaganya jiwa. Dalam pelaksanaannya pengelola TMJ menerapkan program seperti pemberian sumbangan dana tali kasih untuk keluarga pengelola yang meninggal dunia. Selain itu, karena merupakan destinasi wisata, masyarakat juga mendukung adanya pola hidup bersih dengan peduli untuk menjaga lingkungan sekitar kawasan wisata.

3. Terjaganya Akal

Program pengembangan kawasan pedesaan TMJ turut berperan dalam terjaganya akal. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya program pelatihan bagi pengelola TMJ dalam hal pengelolaan dan SOP.

4. Terjaganya Keturunan

Kawasan Pedesaan TMJ juga berperan dalam menjaga keturunan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya fasilitas berupa gaji yang diberikan kepada Pengelola BUMDes. Selain itu, TMJ juga dapat meningkatkan taraf ekonomi yang dapat digunakan sebagai sarana biaya pendidikan dan kebutuhan anak.

5. Terjaganya Harta

Sebagai bentuk dukungan dalam terjaganya harta, program pengembangan kawasan pedesaan TMJ turut berperan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa yang tergabung dalam kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pariwisata setempat akibat adanya pandemi Covid-19.
2. Sumber daya kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya juga belum optimal. Hal ini salah satunya ditunjukkan dari sumber daya anggaran yang belum terealisasi akibat adanya pengalihan dana untuk penanganan pandemi Covid-19.
3. Sikap pelaksana implementasi kebijakan baik dari Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, dan masyarakat cukup baik. Dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut merupakan salah satu modal awal kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.
4. Struktur birokrasi pada pengelola kawasan pedesaan Tri Manunggal Jaya belum optimal. Hal tersebut dikarenakan SOP yang mengatur pelaksanaan kegiatan wisata belum dilaksanakan secara optimal.
5. Berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, adanya program pengembangan kawasan pedesaan ini turut berperan dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini khususnya pengelola Kawasan Pedesaan Tri Manunggal Jaya. Selain itu ucapan terimakasih juga disampaikan kepada ketua tim, anggota tim, serta pembimbing Pak Ahmad Nur Alfianto dan Ibu Yeny Fitriyani yang telah memberikan bimbingan, dan arahan kepada tim penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).
- Antara. (2021). Jumlah Pengunjung Candi Borobudur Turun dari 4,39 Juta Jadi 996 Ribu Orang. Retrieved from <https://bisnis.tempo.co/read/1419303/jumlah-pengunjung-candi-borobudur-turun-dari-439-juta-jadi-996-ribu-orang>
- Badan Pusat Statistik. (2018). Jumlah Pengunjung Candi Borobudur. Retrieved from <https://magelangkab.bps.go.id/dynamictable/2018/11/14/195/jumlah-pengunjung-candi-borobudur.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Magelang dalam Angka 2021*. Magelang: BPS Kabupaten Magelang.
- Bappenas. (n.d.). *Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2005*. Jakarta.
- Budiono. (2019). Pariwisata yang Good, Better, Best. Retrieved from <https://www.magelangkab.go.id/home/detail/pariwisata-yang-good--better--best/3316>
- Chaudhary, M., Lama, R., & Management, T. (2014). Community Based Tourism Development in Sikkim of India-A Study of Darap and Pastanga Villages Keywords : Community-based tourism development , rural tourism , tourism in Sikkim Community Based Tourism Development in Sikkim of India – A Study of Darap and. *Transnational Corporations Review*, 6(May 2018), 228–237.
- Edward III, G. C. (1984). *Public Policy Implementing*. London-England: Jai Press Inc.
- Ekowati, M. R. (2009). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Caraka.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Irawan, E. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. *Jejaring Administrasi Publik*, 7(2).
- Kawer, O. F. S., M. Baiquni, Y. T. K., & Subarsono, A. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dengan Pendekatan Hibrida Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua,. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(3), 245–253.
- Kemenparenkraf. (2020). Laporan Akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia. Retrieved from https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1554437393_Laporan_Akhir.pdf
- Kemenparenkraf. (2021). Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020. Retrieved from <https://www.kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/Statistik-Kunjungan-Wisatawan-Mancanegara-2020>
- Kholil. (2015). *Rekayasa Model Sistem Dinamik Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Nirlimbah (zerowaste) studi kasus di Jakarta Selatan*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Lahamadi, F., Ogotan, M., & Londa, V. Y. (2016). Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan

Tobelo Kabupaten Halmaera Utara). *Jurnal Administrasi Public*, 3(4).

Legi, R., Rompas, W. Y., & Pombengi, J. d. (2015). Implementasi Pendekatan Bottom-Up Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Admisnistrasi Publik*, 1(10).

López-Guzmán, T., Sánchez-Cañizares, S., & Pavón, V. (2011). Community - Based Tourism In Developing Countries: A Case Study. *Rismos: An International Multidisciplinary Journal Of Tourism*, 6(1), 69–84.

Magelang, P. (2011). *Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang tahun 2010-2030*.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif (terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi)*. Jakarta: UI-Press.

Mondal, S. H. (2017). SWOT Analysis and Strategies to Develop Sustainable Tourism in Bangladesh. *UTMS Journal of Economics*, 8(2), 159–167.

Mustika, S. (2020). Jumlah Wisatawan Nusantara Menyusut 61 persen. Retrieved from <https://travel.detik.com/travel-news/d-5292195/jumlah-wisatawan-nusantara-menyusut-61-persen>

Pallewa, A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA. *Jurnal Katalogis*, 4(7), 181–192.

Sabatier, P. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy*, 6, 21–48.

Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Suriadikusumah, Talkuputra, & Alemina. (2011). Rancangan Pengembangan Kawasan Agropolitan Berdasarkan Karakteristik Lahan Di Kabupaten Aceh Besar. *Bionatura – Jurnal Ilmu-Ilmu Hayati Dan Fisik*, 13(1), 47–57.

Sururi, A. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25.

Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu.

Tampah, S. R., Pratiknjo, M. H., & Londa, V. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019 pada Sektor Pariwisata di Kota Tomohon. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 17(1), 135 – 146.

TMJ, P. Bumde. (2021). *Wawancara dengan Pengelola TMJ*.

Widodo, J. (2013). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Zainal, V. R., Joyokusumo, S., Hulmansyah, & Wihasto, H. (2013). *Islamic Management Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah*. Yogyakarta: BPFE.

Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.